

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT:
DONALD TRUMP MELAKUKAN RENEGOSIASI KETERLIBATAN AS
DALAM TRANSPACIFIC PARTNERSHIP SKRIPSI (TPP)**

Christofora Adeline Lieadi

071511233017

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Email: adelinelieadi@yahoo.com

ABSTRAK

Perjanjian perdagangan yang melibatkan negara-negara di sekitar kawasan Samudera Pasifik, yakni *Trans-Pacific Partnership* (TPP), menjadi salah satu cara memperluas pengaruh AS. Bergabungnya AS dalam TPP untuk melakukan strategi *Pivot to Asia* pada masa pemerintahan Barack Obama lantas dihentikan dengan adanya keputusan Presiden Donald Trump pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden. Renegosiasi keterlibatan AS dalam TPP merupakan kebijakan luar negeri pertama yang dikeluarkan oleh Trump, sesuai dengan perwujudan prinsip dan kepentingan nasional yang telah ditentukan melalui *Trump administration*. Trump memiliki keinginan untuk mewujudkan kepentingan nasional AS melalui peningkatan hubungan bilateral dengan masing-masing negara anggota TPP. Perwujudan kepentingan nasional tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya. Upaya yang dimaksud dapat berupa pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA), negosiasi kerjasama perdagangan dengan pemimpin negara, maupun penyesuaian hambatan perdagangan dalam proses ekspor-impor. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kepentingan nasional AS, dengan meningkatkan hubungan bilateral dengan Australia, Brunei, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam, belum berjalan secara signifikan dalam periode waktu 2017 hingga 2019. Namun, hubungan bilateral AS dengan masing-masing negara akan terus meningkat melalui upaya realisasi negosiasi dan pertemuan yang telah dilakukan.

Kata kunci: *Trans-Pacific Partnership*, Amerika Serikat, kebijakan luar negeri, Donald Trump, hubungan bilateral.

Pada Desember 2016, Donald Trump memberikan pengumuman melalui sebuah video yang menyatakan adanya intensi untuk melaksanakan sejumlah rencananya pada hari pertama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (BBC, 2016). Salah satunya mencantumkan niatan untuk melakukan renegotiasi keterlibatan AS dalam kerjasama *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Setelah menjabat secara resmi sebagai Presiden AS pada Januari 2017, Trump lantas menandatangani memorandum pada 23 Januari 2017 yang menyatakan agar *United States Trade Representative* (USTR) menjalankan proses melakukan renegotiasi keterlibatan AS dalam TPP atau segala bentuk perundingan yang berkaitan dengan TPP (World Trade Online, 2017). Melalui Wakil Penasehat Umum USTR, Maria L. Pagan, Trump memberitahukan kepada pihak depository TPP, yakni Selandia Baru, bahwa AS memutuskan untuk melakukan renegotiasi keterlibatan AS dalam TPP dan berbagai proses negosiasi di dalamnya. Memorandum tertulis yang dikeluarkan oleh Trump menunjukkan bahwa adanya intensi AS untuk melindungi pekerjaannya dan menciptakan perdagangan yang adil dan menguntungkan, serta dapat mewujudkan kepentingan negara. Trump juga menegaskan bahwa bagian administrasi negara akan melakukan transaksi, negosiasi, atau bentuk kesepakatan lainnya, secara bilateral dengan masing-masing negara.

Setelah satu minggu berlalu, tepatnya 30 Januari 2017, Maria L. Pagan, Wakil Penasehat Umum USTR, memberikan pernyataan resmi melalui sebuah surat yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, selaku *TPP Depositary*. Melalui surat yang diberikan, ditegaskan bahwa AS tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam TPP dan tidak memiliki kewajiban hukum meskipun telah menandatangani kesepakatan TPP pada 4 Februari 2016. Proses penandatanganan kesepakatan TPP yang dilakukan oleh Mantan Presiden AS, Barack Obama, tersebut lantas secara resmi dihentikan pada 30 Januari 2017 pada masa pemerintahan Donald Trump. Keterlibatan AS dalam TPP selama kurang lebih satu tahun menunjukkan adanya banyak keuntungan yang dirasakan oleh AS. Salah satunya terkait kerjasama AS dengan Jepang terkait transparansi dan keadilan prosedur dari berbagai alat dan produk medis (USTR, 2017). Namun, dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri tersebut menunjukkan turunnya kredibilitas negosiasi AS, menurunnya kepemimpinan ekonomi AS, dan menghancurkan persaingan firma-firma AS yang sebelumnya bersaing ketat, serta memberikan kesempatan bagi Cina untuk menguatkan peran dalam perdagangan regional di kawasan Asia Pasifik (William & Ferguson, 2017: 2).

Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan wadah bagi para pekerja dan pebisnis Amerika untuk meningkatkan ekspor produk-produk asli Amerika Serikat dan menambah lapangan kerja dengan upah yang tinggi di AS. Amerika melihat bahwa dengan adanya 95 persen konsumsi penduduk dunia yang berada di luar wilayah AS, kebijakan penurunan hambatan tarif dalam TPP akan mempermudah AS dalam mengeksport produk dan jasa yang dimiliki, serta mendukung lapangan pekerjaan di AS. Kehadiran TPP yang telah melalui proses negosiasi panjang dan ditandatangani pada Oktober 2015 oleh 12 negara tersebut dinilai masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan belum adanya keterlibatan AS. Melalui kehadiran TPP, AS melihat bahwa Asia merupakan pasar dengan tingkat pertumbuhan terbesar di dunia. Keberlangsungan TPP memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian AS. Apabila Amerika tidak terlibat dalam TPP, maka hal tersebut dapat mengancam kepemimpinan Amerika di Asia. Tidak hanya pengurangan hambatan tarif, melalui adanya kerjasama TPP, AS dapat

mempererat hubungan dengan negara-negara anggota, dimana melalui TPP, AS dapat mencerminkan kepentingan dan nilai yang dipegang oleh Amerika dalam standar lapangan pekerjaan.

Strategi peningkatan kepemimpinan AS dalam bidang perdagangan dapat dilakukan melalui manifestasi nyata TPP sebagai salah satu cara untuk menjalankan keseimbangan di kawasan Asia. Tidak hanya itu, melalui TPP, AS memiliki komitmen pada kawasan Asia Pasifik untuk menjalankan perdagangan yang menekankan pada adanya keterbukaan dan keadilan yang dapat memotivasi negara-negara untuk meningkatkan standar perdagangan yang dapat menguntungkan kepentingan masing-masing. TPP dinilai sebagai wadah yang menguntungkan bagi AS karena sejumlah faktor. Pertama, kerjasama TPP melibatkan aktor negara sehingga kompetisi yang terjadi dapat berjalan secara seimbang. Kedua, adanya akses jaringan internet yang tergolong bebas dalam kawasan, dimana aliran informasi berjalan dengan bebas, namun tetap meningkatkan perlindungan privasi dari masing-masing pengguna. Ketiga, adanya akses pasar yang seimbang, dimana pebisnis dan pekerja AS dapat bersaing secara adil dalam persaingan pasar yang berkembang pesat dengan menekan hambatan tarif ekspor AS.

Peningkatan kepemimpinan AS dalam TPP juga diikuti dengan keuntungan yang dirasakan secara langsung terhadap perekonomian AS. Penghapusan pajak atau hambatan tarif terhadap produk-produk manufaktur *Made-in-America* memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan ekspor sebesar AS\$56 milyar. Tidak hanya itu, 55 persen tarif pajak yang sebelumnya diberlakukan terhadap ekspor produk-produk otomotif di Michigan juga telah dihapuskan. Di sisi lain, AS dan Jepang telah mencapai kesepakatan untuk menghapuskan hambatan tarif terhadap bahan-bahan otomotif. Hal tersebut berdampak baik terhadap perdagangan yang dilakukan guna memaksimalkan pengembangan bidang otomotif di Amerika.

Dalam pemaparan di bawah ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka melalui lima buku yang berbeda. Pertama, *The United States Withdraws from the TPP* oleh Brock R. Williams dan Ian F. Ferguson mengenai adanya sisi positif dan negatif renegotiasi keterlibatan AS dalam TPP. Kedua, *Donald Trump Withdraws U.S. From Trans-Pacific Partnership: TPP Agreement was aimed at curbing China's advantages* oleh William Mauldin mengenai penegasan yang dilakukan AS terkait tindakan tersebut. Ketiga, *Withdrawal from Trans-Pacific Shifts U.S. Role in World Economy* oleh Yian Q. Mui yang berisikan tentang pengaruh yang mendorong Trump mengambil keputusan tersebut. Keempat, *Consequences of the U.S. Withdrawal from the Trans-Pacific Partnership* oleh Marek Wasinski dan Damian Wnukowski terkait dampak buruk yang dirasakan AS pasca bergabung dengan TPP. Kelima, *The End of the TPP: Symptoms of American Decline and ASEAN's Response* oleh Shaun Narine mengenai perdagangan bebas yang bukan menjadi penyebab masalah ekonomi AS, melainkan globalisasi.

Peneliti melihat bahwa terdapat sisi positif dari pandangan Mauldin, dimana alasan utama dibalik kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump merupakan bentuk proteksi terhadap para pekerja Amerika agar dapat mewujudkan kondisi perekonomian yang lebih sejahtera dan kuat. Hal tersebut didukung dari adanya pandangan Trump yang cenderung membela pekerja, usaha peningkatan pendapatan, dan revitalisasi manufaktur. Dalam hal ini, keinginan AS untuk

kembali melakukan negosiasi NAFTA dan aliansi ekonomi, maupun politik, lainnya merupakan tindakan yang dinilai lebih mampu meningkatkan perekonomian AS.

Untuk menjelaskan peran dan kepentingan negara dalam kesepakatan perdagangan kawasan dan menunjukkan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, peneliti menggunakan lima teori perubahan kebijakan luar negeri. Pertama, teori perubahan kebijakan luar negeri sebagai tindakan pemerintah yang memberikan pengaruh terhadap aspek internasional melalui *Explaining Foreign Policy Change* oleh Vinsensio Dugis. Kedua, teori perubahan kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh gagasan pengambil keputusan yang dipaparkan oleh Judith Godstein dan Robert O. Keohane melalui *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*. Ketiga, melalui *Making American Foreign Policy*, Ole R. Holsti memaparkan bahwa teori perubahan kebijakan luar negeri adalah hasil pemikiran rasional dari para pengambil keputusan. Keempat, Omestad memaparkan bahwa teori perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh lawan yang dihadapi suatu negara dalam buku milik Valerie M. Hudson yang berjudul *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Second Edition*. Kelima, melalui *Foreign Policy Decision-Making (Revisited)*, Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin memaparkan bahwa teori perubahan kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh peran pengambil keputusan dalam suatu sistem.

Peneliti melihat bahwa pandangan Vinsensio Dugis dapat mengantarkan analisa yang akan dilakukan terhadap topik yang diangkat. Hal tersebut didasari pandangan bahwa aspek-aspek yang dikemukakan akan dapat menjelaskan rumusan masalah yang sesuai pada topik ini. Kebijakan luar negeri yang dimiliki suatu negara tentunya memiliki orientasi tujuan yang jelas. Tujuan yang lantas berusaha diwujudkan oleh Trump dengan melakukan perubahan kebijakan luar negeri terkait keanggotaan Amerika Serikat dalam TPP adalah dengan mewujudkan kepentingan nasional yang dirasa lebih menguntungkan apabila dilakukan melalui hubungan bilateral, trilateral, maupun multilateral dengan masing-masing negara anggota TPP. Tidak hanya itu, prinsip dan konsep dasar kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Vinsensio Dugis menunjukkan adanya pengaruh tujuan atau kepentingan kebijakan luar negeri dibentuk dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Prinsip dan konsep dasar tersebut telah ditunjukkan dengan jelas melalui adanya upaya perwujudan kepentingan nasional, sekaligus prinsip AS dalam mengutamakan hubungan atau relasi bilateral, trilateral, ataupun multilateral dengan kesebelas negara anggota TPP lainnya.

Pemahaman mengenai perubahan politik luar negeri dimulai dengan memahami argumen-argumen terkait politik luar negeri itu sendiri. Dengan melalui langkah pertama untuk memahami konsep politik luar negeri, maka perubahan politik luar negeri dapat terjadi berikutnya. Kebijakan luar negeri yang dimaknai sebagai sekumpulan tujuan, yakni intensi, yang dibentuk oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang, agar dapat mempengaruhi aktor, atau kondisi tertentu di suatu negara berdaulat, sehingga kepentingan yang diinginkan pihak pembuat kebijakan dapat terlaksana (Cohen & Harris, 1975: 3831, dalam Gustavsson, 1999: 75). Melalui pemahaman tersebut, Gustavsson melihat bahwa pemerintah berperan sebagai praktisi kebijakan politik dan tindakan yang dilakukan tanpa adanya perilaku-perilaku yang tidak terduga. Di sisi lain, Hermann (1990: 5) melihat bahwa kebijakan luar negeri merupakan program yang berbasis tujuan,

atau bahkan permasalahan, yang dibentuk oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan, dan ditujukan ada berbagai pihak diluar para pembuat kebijakan. Bahkan, adanya perubahan kebijakan luar negeri menunjukkan adanya keinginan untuk menarik perhatian dari negara lain.

Penentu perubahan kebijakan luar negeri suatu negara sendiri ditentukan oleh adanya perubahan keempat agen yang ada, yakni arahan dari pemimpin, advokasi birokratis yang dimiliki negara, fungsi restrukturisasi domestik, dan pengaruh eksternal yang sangat dominan. Adanya fase-fase yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan menentukan adanya perubahan besar dalam kebijakan luar negeri (Hermann, 1990: 13). Keempat agen yang mempengaruhi adanya perubahan kebijakan luar negeri lantas menghantarkan pada proses penentuan keputusan, dimana hal tersebut mengarahkan pada perubahan terkait program, tujuan, dan orientasi internasional. Sedangkan Rosati (1994: 225, dalam Gustavsson, 1999: 75) memandang bahwa kebijakan luar negeri merupakan ruang lingkup dan seluruh cakupan tujuan, strategi, dan instrument yang dipilih oleh pemerintah, selaku pembuat kebijakan, sebagai tanggapan kondisi lingkungan yang ada di masa sekarang, maupun yang akan datang.

Melalui adanya perbedaan hasil, aksi, dan berbagai hal terkait kebijakan luar negeri, maka konseptualisasi perubahan dalam kebijakan luar negeri juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkatan (Hermann, 1990: 6). Pertama, adanya perubahan penyesuaian yang menunjukkan perubahan-perubahan kecil terkait usaha perubahan kebijakan luar negeri yang telah ada. Kedua, adanya perubahan program yang berkaitan dengan perubahan tujuan dan metode yang digunakan, tanpa mengubah tujuan dasar suatu kebijakan luar negeri. Ketiga, adanya perubahan tujuan, dimana terjadi perubahan tujuan atau target utama yang ditentukan sebelum kebijakan luar negeri dikeluarkan. Keempat, adanya perubahan orientasi internasional yang berkaitan dengan perubahan dasar orientasi negara terhadap berbagai urusan dunia. Perubahan-perubahan yang ada terkait kebijakan luar negeri tersebut diusulkan dan ditanggapi oleh Rosati (1994: 236, dalam Gustavsson, 1999: 76) dengan memberikan usulan untuk menentukan tingkatan intensifikasi, perbaikan, pembaharuan, dan restrukturisasi yang berpengaruh terhadap perubahan kecil, sedang, dan besar dalam ruang lingkup, tujuan, maupun strategi pembentukan kebijakan luar negeri tersebut. Di sisi lain, Goldmann (1988: 10, dalam Gustavsson, 1999: 76) melihat bahwa perubahan kebijakan luar negeri dapat dipahami secara sederhana sebagai bentuk tindakan baru dalam menanggapi suatu situasi yang ada, maupun penggunaan tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya dalam menanggapi situasi atau kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Perubahan-perubahan yang ada terkait kebijakan luar negeri lantas dapat digolongkan menjadi berbagai bentuk berbeda yang dapat menjelaskan perubahan tersebut. Berbagai bentuk yang berbeda dalam menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri meliputi adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan atau pemegang jabatan, perubahan kekuatan dan munculnya pemerintahan baru, adanya fokus terhadap pemerintahan yang telah memegang kekuatan selama lebih dari satu tahun, serta perubahan yang tidak mementingkan adanya restriksi atau batasan-batasan tertentu (Gustavsson, 1999: 77). Pandangan yang dimiliki penulis cenderung berusaha untuk melihat adanya kemungkinan adanya perubahan dalam ruang lingkup pemerintahan itu sendiri dan tidak terlalu berfokus pada isu-isu yang ada pada saat itu. Sedangkat

Hermann lebih berfokus pada pemerintahan tanpa melihat adanya batasan waktu tertentu.

Perubahan kebijakan luar negeri dapat terjadi karena adanya berbagai faktor bebas dan adanya campur tangan berbagai hal lain. Faktor-faktor bebas yang dimaksud adalah faktor eksternal, domestik, historis, dan berbagai aspek kultural. Sedangkan adanya campur tangan meliputi berbagai persepsi, kepribadian, perilaku elit, dan proses pembentukan kebijakan yang berbeda-beda (Gustavsson, 1999: 78). Kedua kategori faktor penentu perubahan kebijakan luar negeri tersebut lantas tidak saling berkaitan, namun adanya campur tangan menentukan apabila faktor-faktor bebas dapat mempengaruhi kebijakan ataupun tidak.

Pada bulan Juli 2018, Craig Boyd Allen, Duta Besar AS untuk Brunei, menyatakan bahwa keputusan melakukan renegotiasi keterlibatan AS dalam TPP memberikan dampak signifikan bagi Brunei. Hal tersebut ditunjukkan dari hubungan militer dan keamanan yang tidak terpengaruh, dimana AS justru memperkuat relasinya dengan memaksimalkan kolaborasi dengan Brunei melalui pelatihan, peralatan militer, maupun pembagian informasi antar negara. Di sisi lain, kegelisahan yang dirasakan oleh pemerintah Brunei tidak lantas mempengaruhi relasi kedua negara. AS justru mampu menjaga hubungan perekonomian, perdagangan, dan investasi yang kuat, meski tanpa adanya perjanjian formal yang mengikat kedua negara (Bandial, 2018: 8). Tidak hanya itu, AS juga turut berperan dalam menjalankan proyek-proyek pengembangan infrastruktur, penyelesaian fasilitas perjanjian perdagangan global, serta investasi. Dengan adanya ketergantungan ekonomi Brunei yang cenderung berfokus hanya dalam bidang minyak dan gas, perusahaan-perusahaan AS mengalami kesulitan untuk melakukan perdagangan atau investasi dalam bidang lain. Namun, AS tetap berupaya mempertahankan dan memperkuat relasinya karena Brunei merupakan salah satu anggota ASEAN, kawasan yang menjadi sasaran dagang AS. Hal tersebut juga didorong dengan mulai terbukanya Brunei dan AS untuk mencari sektor dagang dan investasi potensial lainnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian kedua negara.

Di sisi lain, hubungan bilateral antara AS dan Malaysia tidak lantas berhenti pada masa pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kunjungan pertama yang dilakukan Mahathir Mohamad ke AS. Meskipun kunjungan yang dilakukan bukan untuk menemui Trump, tujuan utama kunjungan yang dilakukan Mahathir tersebut adalah untuk melihat indikator arah hubungan AS-Malaysia pasca kembali menjabat sebagai perdana menteri. Di sisi lain, adanya pertemuan antara *Secretary of State* Mike Pompeo dengan Mahathir di Malaysia pada Juli 2018, serta pertemuan antara Menteri Pertahanan Mohamad Sabu dengan Sekretaris Pertahanan Jim Mattis di Washington pada September 2018 berupaya memulihkan hubungan kedua negara. Tidak hanya itu, adanya upaya *Trump administration* untuk mengatasi isu Israel-Palestina atau Iran juga menjadi salah satu cara untuk mempertahankan dan memperluas hubungan kedua negara (Parameswaran, 2018: 1). Namun, kedudukan Mahathir sebagai perdana menteri juga tidak dapat dipastikan untuk periode waktu berapa lama. Hal tersebut dikarenakan adanya wacana bahwa Anwar Ibrahim, pemimpin koalisi Pakatan Harapan, akan menggantikan jabatan Mahathir sebagai perdana menteri. Dengan adanya kemungkinan tersebut, hubungan AS dan Malaysia juga tidak dapat dipastikan kelanjutannya.

Peran penting AS di Singapura juga dapat dilihat dari tingginya tingkat investasi yang dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dari peran AS sebagai investor asing terbesar bagi Singapura, dimana perdagangan barang yang dilakukan kedua negara telah mencapai lebih dari AS\$45 milyar. Tidak hanya itu, secara keseluruhan, saham investasi asing yang dimiliki AS di Singapura mencapai lebih dari AS\$228 milyar. Kedekatan bilateral keduanya juga dapat dilihat dari peran Singapura sebagai *visa waiver program country*, dimana warga negaranya dapat melakukan kunjungan bisnis, maupun pariwisata, ke AS selama 90 hari atau kurang, tanpa perlu menggunakan visa. Keduanya juga memiliki peran dalam beberapa organisasi internasional yang sama, yakni PBB, APEC, ASEAN *Regional Forum*, IMF, WB, dan WTO (U.S. Department of State, 2017: 2).

Para pakar ekonomi melihat bahwa perdagangan bilateral yang terjadi antara AS dan Vietnam akan terus meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya perdagangan barang yang terus meningkat pasca normalisasi diplomatik. Perdagangan barang yang terjadi antara AS dan Vietnam mencapai AS\$60 milyar pada tahun 2018 (Council of Foreign Relations, 2019: 9). Peningkatan yang cukup signifikan tersebut didukung adanya kondisi dimana pasar AS menjadi destinasi utama ekspor barang Vietnam, secara khusus dalam bidang tekstil, elektronik, dan produk hewani, seperti makanan laut. Tidak hanya terkait peningkatan perdagangan yang signifikan, adanya ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara juga memaksa Trump untuk memberikan hambatan perdagangan bagi Vietnam. Ketidakseimbangan perdagangan barang yang mencapai AS\$39,5 milyar pada tahun 2018 lantas memaksa AS memberlakukan hambatan berupa proteksi kekayaan intelektual, regulasi keamanan makanan, larangan akses internet dan ekonomi digital, serta pengetatan terhadap kurangnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik dan swasta.

Di sisi lain, meskipun hubungan bilateral AS dan Australia sempat mengalami tantangan pasca keputusan AS melakukan renegotiasi keterlibatan dalam TPP, relasi kedua negara tidak lantas menurun. Hal tersebut ditunjukkan pula dengan pembatasan pengaruh Tiongkok di Australia, sekaligus perlawanan pengaruh Tiongkok di kawasan Pasifik Barat Daya. Pada tahun 2018, kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence, serta adanya pertemuan antara Trump dan Turnbull terkait pensiunan kapal induk *USS Intrepid* dalam rangka 75 tahun peringatan *Battle of the Coral Sea*, menjadi tolak ukur kembali membaiknya hubungan kedua negara. Berdasarkan kepercayaan dari 76% warga negara Australia terhadap pemerintahan AS, aliansi kedua negara tergolong masih kuat, terutama adanya kepentingan untuk menjaga keamanan Australia. Di sisi lain, Australia juga memiliki kekuatan utama berdasarkan posisi geografisnya, dimana berada di titik temu antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal tersebut sangat sesuai dengan strategi *Trump Administration* dalam upaya mewujudkan *Free and Open Indo-Pacific* (CRS, 2019: 1).

Peran AS sebagai investor kedua terbesar, setelah Spanyol, bagi Chili merupakan salah satu faktor hubungan perdagangan bilateral kedua negara tetap terjalin dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya investasi yang hampir mencapai AS\$30 milyar. Sama halnya dengan Chili, sasaran penjualan barang dan jasa AS ke Chili justru lebih besar apabila dibandingkan dengan relasi AS dengan pasar dagang yang lebih besar lainnya, seperti Spanyol, Italia, dan Rusia. Tidak hanya itu, AS juga berperan sebagai negara utama sasaran perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil Chili, secara khusus dalam

sektor jasa dan manufaktur. Di sisi lain, sektor agrikultur, kehutanan, dan perikanan juga menunjukkan adanya kemajuan senilai lebih dari 5,2% per tahunnya, yakni sebesar AS\$1,478 milyar. Hubungan perdagangan bilateral kedua negara juga disebut sebagai *a fruitful relationship* karena adanya peran buah-buahan sebagai salah satu produk perdagangan yang penting, dimana pertumbuhannya mencapai lebih dari 7,8% per tahunnya atau sebesar AS\$1,351 milyar. Tidak hanya itu, peran Chili sebagai salah satu negara yang aktif berperan dalam berbagai inisiatif integrasi perdagangan, seperti TPP, *Pacific Alliance*, APEC, OECD, dan WTO juga menunjukkan adanya ketertarikan terhadap rencana pengembangan infrastruktur yang diusulkan oleh Trump. Hal tersebut dinilai sebagai rencana besar dalam pengembangan infrastruktur Chili, yang justru diusulkan oleh AS (Ecovis Chile, 2017: 2).

Pada 26 September 2017, AS dan Jepang mulai melakukan negosiasi terkait adanya *Japan-U.S. Trade Agreement on Goods*. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya AS untuk mempertahankan hubungan bilateral yang menguntungkan antara kedua negara. AS berjanji untuk menurunkan tarif terhadap sektor agrikultur dan industri dibandingkan dengan pada saat AS masih menjadi anggota TPP, yang menjadi keunggulan Jepang, maupun Australia dan Kanada, sebagai anggota TPP. Keputusan tersebut diikuti dengan adanya keputusan bahwa AS tidak akan memberlakukan tarif yang tinggi terhadap impor suku cadang mobil Jepang ke AS apabila Jepang menyetujui negosiasi kesepakatan dagang sektor agrikultur dan industri yang diusulkan AS. Proses negosiasi yang belum mencapai kesepakatan tersebut lantas didorong dengan pertimbangan bahwa Jepang harus tetap mematuhi aturan perdagangan bebas dalam ruang lingkup multinasional (The Japan Times, 2019). Di sisi lain, upaya yang dilakukan AS agar dapat memaksimalkan hubungan bilateralnya dengan Jepang, sekaligus mengurangi angka defisit yang dialami, adalah melalui adanya penekanan hambatan tarif terhadap produk pertanian Jepang sekaligus memaksa Jepang untuk memaksimalkan impor produk agrikultur AS. Namun, Jepang juga tetap mempertahankan hambatan tarif yang diberlakukannya, sesuai dengan kesepakatan negosiasi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP).

Pada 26 September 2017, AS dan Jepang mulai melakukan negosiasi terkait adanya *Japan-U.S. Trade Agreement on Goods*. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya AS untuk mempertahankan hubungan bilateral yang menguntungkan antara kedua negara. AS berjanji untuk menurunkan tarif terhadap sektor agrikultur dan industri dibandingkan dengan pada saat AS masih menjadi anggota TPP, yang menjadi keunggulan Jepang, maupun Australia dan Kanada, sebagai anggota TPP. Keputusan tersebut diikuti dengan adanya keputusan bahwa AS tidak akan memberlakukan tarif yang tinggi terhadap impor suku cadang mobil Jepang ke AS apabila Jepang menyetujui negosiasi kesepakatan dagang sektor agrikultur dan industri yang diusulkan AS. Proses negosiasi yang belum mencapai kesepakatan tersebut lantas didorong dengan pertimbangan bahwa Jepang harus tetap mematuhi aturan perdagangan bebas dalam ruang lingkup multinasional (The Japan Times, 2019). Di sisi lain, upaya yang dilakukan AS agar dapat memaksimalkan hubungan bilateralnya dengan Jepang, sekaligus mengurangi angka defisit yang dialami, adalah melalui adanya penekanan hambatan tarif terhadap produk pertanian Jepang sekaligus memaksa Jepang untuk memaksimalkan impor produk agrikultur AS. Namun, Jepang juga tetap mempertahankan hambatan tarif yang diberlakukannya, sesuai dengan

kesepakatan negosiasi *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP).

Kerjasama yang dilakukan AS dan Meksiko juga melibatkan bidang layanan telekomunikasi. Perjanjian yang disepakati keduanya berkaitan dengan layanan *broadband* seluler, seperti *smartphones* maupun perangkat pintar lainnya. Perundingan terus dilakukan secara rutin oleh kedua negara sebagai upaya memajukan pertumbuhan telekomunikasi, yang tergolong sebagai salah satu sektor dinamis, dan untuk memberikan fasilitas layanan telekomunikasi yang sesuai dengan area perbatasan. Tidak hanya itu, kedua negara juga tergabung dalam beberapa organisasi internasional lain, seperti APEC, OECD, *International Energy Agency* (IEA), IMF, WB, WTO, *International Maritime Organization* (IMO), dan *Wassenaar Arrangement on conventional arms* (U.S. Department of State, 2019: 3).

Ekspor yang dilakukan oleh Peru meliputi buah-buahan, sayuran, kopi, coklat, dan biji gandum. Tidak hanya pada sektor agrikultur, ekspor yang dilakukan kedua negara juga meliputi sektor-sektor lain. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya ekspor minyak bumi dan batu bara, mesin dan mesin listrik, plastik, serta kendaraan. Di sisi lain, dengan adanya PTPA, ekspor produk-produk agrikultur yang dilakukan AS ke Peru tidak dipengaruhi oleh harga yang ditentukan Peru, dimana hal tersebut menguntungkan AS, secara khusus dalam menghadapi persaingan dengan Argentina, pemasok utama jagung lainnya ke Peru. Tidak hanya itu, pada awal tahun 2017, Peru mempermudah prosedur fitosanitari terhadap impor beras AS (Nolte, 2017: 2).

AS memiliki peran yang sangat signifikan sebagai investor besar di Selandia Baru. AS berperan sebagai investor kedua terbesar, setelah Australia. Hal tersebut ditunjukkan dari pencapaian investasi sebesar AS\$5,5 milyar pada tahun 2017. Berlaku pula sebaliknya, Selandia Baru menempatkan AS sebagai tujuan investasi asing kedua terbesar, dimana Selandia Baru menempatkan sekitar 15,4 persen dari keseluruhan investasi asing yang dilakukannya sebesar AS\$2,66 milyar (U.S. Department of State, 2018: 2). Investasi asing yang dilakukan Selandia Baru tersebut ditunjukkan dari peran signifikan melalui sektor manufaktur dan perdagangan grosir. Tidak hanya itu, keterlibatan lebih dari 300 perusahaan AS yang memiliki cabang di Selandia Baru juga beroperasi melalui kinerja agen-agen lokal, maupun sistem *joint venture*. Di sisi lain, keduanya juga terlibat dalam sejumlah organisasi internasional yang sama, yakni PBB, OECD, APEC, *ASEAN Regional Forum*, IMF, WB, dan WTO.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti telah memaparkan bahwa keputusan untuk melakukan renegotiasi keterlibatan AS dalam TPP dilakukan karena adanya upaya pelaksanaan kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimiliki AS berupa intensi untuk menciptakan perdagangan yang adil dan menguntungkan secara bilateral dengan masing-masing negara. Upaya pelaksanaan kepentingan nasional AS dilakukan melalui negosiasi maupun kesepakatan bilateral. Selama periode waktu dua tahun pasca keputusan renegotiasi keterlibatan AS, yakni tahun 2017 hingga 2019, berbagai upaya pelaksanaan transaksi, negosiasi, dan kesepakatan bilateral telah dicapai AS dengan negara-negara anggota TPP lainnya, yakni Australia, Brunei, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam, meskipun Malaysia dan Vietnam menjadi dua negara yang tidak memiliki FTA dengan AS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN ARTIKEL DALAM BUKU

- Coicaud, Jean-Marc & Nicholas J. Wheeler. 2008. *National interest and international solidarity: Particular and universal ethics in international life*, Hong Kong: United Nations University Press.
- Feldman, Stephen M. 2017. *The New Roberts Court, Donald Trump, and Our Failing Constitution*, New York: Palgrave Macmillan.
- Goldstein, Judith & Robert O. Keohanne. 1993. *Ideas and Foreign Policy: Beliefs, Institutions, and Political Change*, New York: Cornell University Press.
- Holsti, Ole R. 2006. *Making American Foreign Policy*, New York: Routledge.

JURNAL

- Gustavsson, Jakob. 1999. "How Should We Study Foreign Policy Change", dalam *Cooperation and Conflict*, Vol. 34, pp. 73-95.
- Hermann, Charles. 1990. "Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy", dalam *International Studies Quarterly*, Vol. 34, Ch. 1, pp. 3-21.
- Narine, Shaun. 2017. "The End of the TPP: Symptoms of American Decline and ASEAN's Response", *Perspective*, No. 25.
- Thayer, Carlyle A. 2016. "US To Withdraw From TPP: Let's Make a Deal", *Thayer Consultancy Background Brief*.

ARTIKEL DARING

- Bandial, Ain, "As region gears up for Trump visit, the US says it remains committed to ASEAN", 30 Oktober 2017, <https://thescoop.co/2017/10/30/region-gears-trump-visit-u-s-says-remains-committed-asean/> (Diakses 10 Mei 2019)
- Bandial, Ain, "There's a lot people don't understand about Brunei", 17 Juli 2018, <https://thescoop.co/2018/07/17/theres-lot-people-dont-understand-brunei/> (Diakses 10 Mei 2019)
- Ecovis Chile, "Chile and the United States: a fruitful relationship", 4 April 2017, <https://www.ecovis.com/cl/blog/chile-united-states-fruitful-relationship/> (Diakses 10 Mei 2019)
- Parameswaran, Prashanth, "Mahathir Visit Spotlights US-Malaysia Relations Under New Government", 25 September 2018, <https://thediplomat.com/2018/09/mahathir-visit-spotlights-us-malaysia-relations-under-new-government/> (Diakses 10 Mei 2019)
- Parameswaran, Prashanth, "The Real Test for US-Malaysia Relations in the Trump Era", 6 September 2017, <https://thediplomat.com/2017/09/the-real-test-for-us-malaysia-relations-in-the-trump-era/> (Diakses 10 Mei 2019)
- The Japan Times, "Abe and Trump express confidence in Japan-U.S. trade negotiations following talks in Washington", 27 April 2019, <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/27/national/politics-diplomacy/trump-confident-u-s-japan-trade-deal-can-reached-quickly/#.XMrxqVUzBIU> (Diakses 2 Mei 2019)
- The Japan Times, "Much is at stake in the Japan-U.S. trade talks", 19 April 2019, <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2019/04/19/editorials/much-stake-japan-u-s-trade-talks/#.XMrxz1UzBIU> (Diakses 2 Mei 2019)

- The Japan Times. "Japan and U.S. kick off first day of trade talks with focus on cutting tariffs on goods", 16 April 2019, <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/04/16/business/japan-u-s-focus-cutting-tariffs-goods-trade-talks-tokyo-says/#.XMrx1FUzbIU> (Diakses 2 Mei 2019)
- Williams, Brock R. & Ian F. Fergusson, "The United States Withdraws from the TPP", 2003, <https://fas.org/sgp/crs/row/IN10646.pdf> (Diakses 5 April 2018)

DOKUMEN dan SITUS WEB RESMI

- Council of Foreign Relations, "The Evolution of U.S.-Vietnam Ties", 20 Maret 2019, <https://www.cfr.org/backgrounder/evolution-us-vietnam-ties> (Diakses 10 Mei 2019)
- Nolte, Gaspar E. "Peru's Symbiotic Trade Relationship with the United States", 10 April 2017, *Global Agricultural Information Network* (Diakses 10 Mei 2019)
- Nolte, Gaspar E. "U.S. – Peru Bilateral Trade Reach Another Record", 1 April 2019, *Global Agricultural Information Network* (Diakses 10 Mei 2019)
- U.S. Department of State, "U.S. Relations With Mexico", 1 April 2019, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35749.htm> 1/ (Diakses 29 April 2019)
- U.S. Department of State, "U.S. Relations With New Zealand", 23 Agustus 2018, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35852.htm> (Diakses 29 April 2019)
- U.S. Department of State, "U.S. Relations With Singapore", 13 September 2017, <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2798.htm> (Diakses 29 April 2019)
- USTR, "USTR Letter to TPP Depository", <https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/1-30-17%20USTR%20Letter%20to%20TPP%20Depository.pdf> (Diakses 14 Maret 2018)
- USTR, "What's in the Trans-Pacific Partnership?", <https://ustr.gov/sites/default/files/TPP-Strategic-Importance-of-TPP-Fact-Sheet.pdf> (Diakses 14 Maret 2018)